



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI RIAU



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa



RENCANA AKSI 2025



+62853-5800-0101



PENGADILAN TINGGI RIAU



PENGADILAN TINGGI RIAU



PT-RIAU.GO.ID



+62853-5800-0101

RENCANA AKSI TAHUN 2025
KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	97%	97%	97%	97%
		2. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	97%	97%	97%	97%
		3. Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%
		4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	40%	40%	40%
		5. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97%	97%	97%	97%

RENCANA AKSI TAHUN 2025
KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Indikator : Penyelesaian Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu								Dana Bersumber dari Biaya Proses Pihak Berperkara
1.	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara perdata yang lebih dari 3 bulan	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara perdata	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
2.	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	√	√	√	√	Terdata jumlah perkara perdata yang lebih dari 3 bulan	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
3.	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	√	√	√	√	Terlaksanya persidangan cepat sederhana dan biaya ringan	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
4.	Menunda persidangan tidak terlalu lama (maksimal 2 minggu)	√	√	√	√	Jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
5.	Memutus perkara perdata tidak melebihi 3 bulan	√	√	√	√	Perkara perdata yang diputus	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
6.	Mencoret perkara perdata yang sudah melebihi batas waktu teguran	√	√	√	√	Perkara perdata yang sudah melebihi batas waktu	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

RENCANA AKSI TAHUN 2025
KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

1.2	Indikator : Penyelesaian Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu								Rp. 107.584.000,-
1.	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara pidana yang lebih dari 3 bulan	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara pidana	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
2.	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	√	√	√	√	Terdata jumlah perkara yang lebih dari 3 bulan	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
3.	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	√	√	√	√	Terlaksananya persidangan cepat sederhana dan biaya ringan	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
4.	Menunda persidangan tidak terlalu lama (maksimal 2 minggu)	√	√	√	√	Jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
5.	Memutus perkara pidana tidak melebihi 3 bulan	√	√	√	√	Perkara pidana yang diputus	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
6.	Mencoret perkara pidana yang sudah melebihi batas waktu teguran	√	√	√	√	Perkara pidana yang sudah melebihi batas waktu	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

RENCANA AKSI TAHUN 2025
KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

1.3	Indikator : Penyelesaian Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu								Rp. 15.041.000,-
1.	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara yang lebih dari 60 hari	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara pidana tipikor	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
2.	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	√	√	√	√	Terdata jumlah perkara pidana tipikor yang lebih dari 60 hari	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
3.	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	√	√	√	√	Terlaksanya persidangan cepat sederhana dan biaya ringan	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
4.	Menunda persidangan tidak terlalu lama (maksimal 2 minggu)	√	√	√	√	Jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
5.	Memutus perkara Pidana Khusus tidak melebihi 60 hari	√	√	√	√	Perkara pidana tipikor yang diputus	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
6.	Mencoret perkara Pidana Khusus sudah melebihi batas waktu teguran	√	√	√	√	Perkara pidana tipikor yang sudah melebihi batas waktu	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

RENCANA AKSI TAHUN 2025
KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

1.4	Indikator : Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi								Rp. 190.000.000,-
1.	Menyusun Putusan Perkara Tingkat Banding yang berkualitas	√	√	√	√	Putusan perkara tingkat banding yang berkualitas	Penegakkan dan Pelayanan Hukum,	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
2.	Mendata Perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi pada pengadilan tingkat pertama.	√	√	√	√	Terdatanya perkara perdata, pidana dan pidana khusus yang tidak melakukan upaya hukum kasasi pada pengadilan tingkat pertama	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
1.5	Indikator: Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan								Rp 25.468.047.000,-
1.	Membentuk Tim Survey Kepuasan Masyarakat	√	√	√	√	Terbentuknya Tim Survey	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	
3.	Menyusun Job Description Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat	√	√	√	√	Job Description Tim SKM	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	
4.	Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan Kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat	√	√	√	√	Jadwal dan Perangkat SKM	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	
5.	Melaksanakan SKM (secara manual atau menggunakan aplikasi)	√	√	√	√	Kuesioner SKM	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	
6.	Mendata dan merekap hasil SKM	√	√	√	√	Data Hasil SKM	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	

RENCANA AKSI TAHUN 2025
KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

7.	Menyusun Laporan Hasil SKM			√		Laporan SKM	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	
8.	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan menindaklanjuti hasil survey			√		Laporan tindak lanjut hasil survey	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	

RENCANA AKSI TAHUN 2025
KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%

RENCANA AKSI TAHUN 2025
KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.1	Indikator : Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu								
1	Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan	√	√	√	√	Jadwal Sidang Tundaan	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Dana Bersumber dari Biaya Proses Pihak Berperkara
2	Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang dilaksanakan	√	√	√	√	BAS	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
3	Membuat Putusan sebelum sidang pembacaan putusan	√	√	√	√	Putusan	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
4	Menginput Amar Putusan dan Tanggal Putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah Sidang Putusan	√	√	√	√	Data Putusan di SIPP	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
5	Mengunggah Salinan Putusan ke SIPP (e-doc)	√	√	√	√	e-doc Salinan Putusan	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

RENCANA AKSI TAHUN 2025
KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

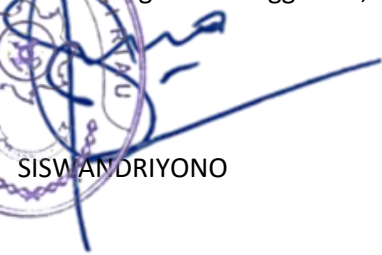
6	Mengirimkan salinan putusan ke Pengadilan Negeri pengaju paling lambat 14 hari, dan selanjutnya menginput tanggal pengiriman Salinan putusan ke SIPP.	√	√	√	√	Dokumen Salinan putusan dan Tanggal Salinan putusan.	Program Dukungan Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
7	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	√	√	√	√	Hasil Evaluasi	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
1.2	Indikator : Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu								
1.	Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan	√	√	√	√	Jadwal Sidang Tundaan	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 14.180.000,-
2.	Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang dilaksanakan	√	√	√	√	BAS	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
3.	Membuat Putusan sebelum sidang pembacaan putusan	√	√	√	√	Putusan	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
4.	Menginput Amar Putusan dan Tanggal Putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah Sidang Putusan	√	√	√	√	Data Putusan di SIPP	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

RENCANA AKSI TAHUN 2025
KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

5.	Mengunggah Salinan Putusan ke SIPP (e-doc)	√	√	√	√	e-doc Salinan Putusan	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
6.	Mengirimkan salinan putusan ke Pengadilan Negeri pengaju paling lambat 14 hari, dan selanjutnya menginput tanggal pengiriman Salinan putusan ke SIPP.	√	√	√	√	Dokumen Salinan putusan dan Tanggal Salinan putusan.	Program Dukungan Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
7	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	√	√	√	√	Hasil Evaluasi	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
1.3	Indikator : Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu								
1.	Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan	√	√	√	√	Jadwal Sidang Tundaan	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 3.709.000,-
2.	Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang dilaksanakan	√	√	√	√	BAS	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
3.	Membuat Putusan sebelum sidang pembacaan putusan	√	√	√	√	Putusan	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

RENCANA AKSI TAHUN 2025
KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

4.	Menginput Amar Putusan dan Tanggal Putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah Sidang Putusan	√	√	√	√	Data Putusan di SIPP	Penegakkan dan Pelayanan Hukum, Dukungan Manajemen	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
5.	Mengunggah Salinan Putusan ke SIPP (e-doc)	√	√	√	√	e-doc Salinan Putusan	Penegakkan dan Pelayanan Hukum, Dukungan Manajemen	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
6.	Mengirimkan salinan putusan ke Pengadilan Negeri pengaju paling lambat 14 hari, dan selanjutnya menginput tanggal pengiriman Salinan putusan ke SIPP.	√	√	√	√	Dokumen Salinan putusan dan Tanggal Salinan putusan.	Program Dukungan Penegakkan dan Pelayanan Hukum, Dukungan Manajemen	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
7	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	√	√	√	√	Hasil Evaluasi	Penegakkan dan Pelayanan Hukum, Dukungan Manajemen	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

Pekanbaru, 2 Januari 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Riau,

SISWANDRIYONO